



PROSEDUR PENGGAJIAN DAN PEMBAYARAN TPP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nunung Sri Nurhayati¹
Mahasiswa Universitas Terbuka¹
nunungsri955@gmail.com¹

Abstract

This is a review of the salary and payment procedures of the Officer's Income Allowance (TPP) in the Regional Revenue Agency of the Government of Northern Kalimantan Province. The Regional Revenue Agency has the primary responsibility in managing the local income and tax receipts. Ensuring efficiency in the remuneration and payment process of the TPP is crucial to ensuring that every employee receives benefits in accordance with the policy in force. It not only increases staff satisfaction but also strengthens transparency and accountability within the organization. The study highlights concrete steps in the process, including data collection, TPP calculation based on established criteria, verification of claims, and delivery of payments to eligible staff. With a thorough understanding of these procedures, the Regional Revenue Agency can improve transparency, accountability, and staff satisfaction related to TPP management.

Keywords: Wages, TPP Payments, Regional Income

Abstrack

Abstract ini mengulas prosedur penggajian dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pendapatan daerah dan penerimaan pajak. Memastikan efisiensi dalam proses penggajian dan pembayaran TPP menjadi krusial guna menjamin bahwa setiap pegawai memperoleh tunjangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pegawai tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi. Penelitian ini menyoroti langkah-langkah konkret dalam proses tersebut, termasuk pengumpulan data, perhitungan TPP berdasarkan kriteria yang ditetapkan, verifikasi klaim, dan pengiriman pembayaran kepada pegawai yang memenuhi syarat. Dengan pemahaman mendalam terhadap prosedur ini, Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan pegawai terkait manajemen TPP.

Kata Kunci : Penggajian, Pembayaran TPP, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Sistem penggajian Pegawai Negeri menggunakan pendekatan penggajian gabungan. Dalam sistem ini, gaji pokok ditetapkan secara seragam untuk pegawai dengan pangkat yang sama, sementara tunjangan diberikan kepada mereka yang memegang tanggung jawab berat, menunjukkan prestasi tinggi, atau melakukan pekerjaan khusus yang memerlukan perhatian dan dedikasi yang terus-menerus. Detail pembayaran gaji pegawai dicatat dalam Daftar Gaji



Induk atau bulanan yang dikeluarkan oleh unit kerja yang mengurus pembayaran gaji pegawai.

Gaji pokok pegawai dibayarkan secara teratur setiap bulan selama mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan jumlah yang sama sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Perundangan saat ini mengatur besaran gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai gaji PNS.

Setiap bulan, selain gaji pokok, pegawai negeri juga menerima tunjangan dan memiliki kewajiban untuk membayar iuran sesuai ketentuan undang-undang. Pegawai ASN/CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki hak untuk menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan evaluasi kinerja, penilaian prestasi kerja dari SKP, serta faktor lain seperti kehadiran dan cuti.

TPP diberikan kepada semua ASN/CASN di provinsi tersebut dan pembayarannya harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Minggu atau hari libur, pembayaran akan dimajukan. TPP tidak diberikan kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik itu ringan, sedang, maupun berat.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa seorang pegawai dalam hal keuangan memiliki hak dan kewajiban, kewajiban yang harus dilakukan adalah dengan membayar iuran sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan hak adalah dengan adanya gaji pokok dan tunjangan sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan pegawai selama bertugas sebagai seorang ASN/CASN. Yang membedakan besar kecilnya TPP adalah besaran gaji yang didapatkan oleh satu pegawai dengan pegawai lainnya,

Ruang lingkup masalah ini adalah keputusan yang diambil dari prosedur penggajian dan pembayaran TPP pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mulai dari :

1. Komponen-komponen Gaji;
2. Dokumen-dokumen Pencairan Gaji;
3. Prosedur Penggajian;

4. Komponen-komponen TPP;
5. Dokumen-dokumen TPP;
6. Prosedur TPP
7. Fungsi-fungsi yang terkait;

Tujuan Penulisan dalam penyusunan karya ilmiah ini, yaitu sebagai syarat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan untuk mengidentifikasi masalah yang sering terjadi pada saat proses pembayaran Gaji dan TPP.

Kegunaan Penulisan ini adalah dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penggajian dan pembayaran TPP, menumbuhkan semangat dalam melaksanakan pekerjaan serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin, sebagai sarana untuk menambah informasi dan referensi bacaan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali).

Metode pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam penyusunan Karya Ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku objek yang sedang diselidiki disebut sebagai Metode Observasi. Nana Sudjana menjelaskan bahwa observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang sedang diteliti. Observasi melibatkan pengamatan sistematis terhadap gejala yang diperhatikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sutrisno Hadi juga mengartikan metode observasi sebagai cara sistematis untuk mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini memungkinkan peneliti atau kolaboratornya untuk mencatat informasi berdasarkan apa yang mereka amati secara langsung selama penelitian. Secara keseluruhan, metode observasi adalah teknik pengumpulan data



yang melibatkan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau objek di lapangan..

b. Studi Kepustakaan

Penulis mencari dan mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan-peraturan, website dan sumber lainnya yang berhubungan dengan kegiatan prosedur penggajian dan pembayaran TPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis yang berada di 5 (Lima) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. BAPENDA memiliki 2 (Dua) bendahara yaitu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki bendahara pembantu yang bertugas di wilayah Kabupaten/Kota.

Sistem penggajian dan pembayaran TPP berada di induk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Proses pembayaran gaji berdasarkan data yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara. Apabila ada perubahan data pegawai akan diinput sebelum tanggal 20 setiap bulannya, apabila melebihi tanggal 20 maka akan diinput pada bulan berikutnya.

Pembayaran TPP berdasarkan pada data absensi dan kinerja (SIMPEG) pada bulan bersangkutan. Pembayaran TPP untuk UPT dilakukan oleh pembantu bendahara di UPT dan berkas pengajuan pencairan TPP diberikan ke BAPENDA maksimal tanggal 7 setiap bulannya.

Beberapa masalah yang sering dijumpai pada saat proses penggajian dan pembayaran TPP diantaranya :

1. Keterlambatan penginputan data pegawai yang melebihi tanggal yang telah ditetapkan sehingga menjadikan mundurnya hak gaji yang diberikan ke pegawai.
2. Keterlambatan pengisian e-kinerja pegawai sehingga menjadikan

pengajuan berkas pembayaran TPP menjadi lambat.

3. Keterlambatan penandatanganan berkas pencairan oleh pejabat yang berwenang dikarenakan sedang tidak berada di tempat atau sedang melakukan Tugas Kedinasan lainnya.
4. Keterlambatan penyerahan berkas pengajuan pencairan TPP dari UPT.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka perlu dilakukan beberapa hal yang dianggap dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada, yaitu :

1. Memberikan batas pengumpulan data pegawai h-3 sebelum batas terakhir yaitu tanggal 17 setiap bulannya agar ada waktu untuk melakukan penginputan.
2. Perlunya ditambah dan dipupuk kedisiplinan pegawai dalam mengisi e-kinerja setiap harinya sehingga pada saat penarikan data e-kin dapat sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Perlunya koordinasi yang baik antara bendahara dan pejabat berwenang agar dapat menyesuaikan penandatanganan berkkas.
4. Perlunya koordinasi yang instensif antara bendahara Bapenda dan Bendahara Pembantu di UPT agar cepat dalam proses pembayaran TPP.

KESIMPULAN

Proses penggajian dan pembayaran TPP menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilakukan percepatan dan inovasi agar hak segera dapat ditunaikan kepada penerima hak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan masukan untuk dapat melaksanakan proses penggajian dan pembayaran TPP secara cepat dan akurat.

DAFTAR PUUSTAKA

- Ali, L. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan



Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Diakses dari [sumber hukum yang relevan].

Sudjana, Nana. (1996). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Situmorang, D. M., Hapsari, V. R., & Marpaung, O. (2021). Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i2.1654>

Hadi, Sutrisno. (2017). *Metodologi Research (Metode Penelitian)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.